



# Rencana Strategis

TAHUN 2020 - 2024

**"Mewujudkan Sains dan Teknologi  
Pengelolaan Perikanan Perairan Umum  
Daratan untuk Kesejahteraan  
Masyarakat Berbasis Kelestarian dan  
Pemanfaatan yang Berkesinambungan"**

**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN  
PENYULUHAN PERIKANAN**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Gubernur H.A. Bastari No. 8 Palembang, Sumatera Selatan  
Tlp : (0711) 564599, 313956; Fax : (0711) 5649601

**Penanggung Jawab :**

*Rezki Antoni S, S.Kel*

*( Plt. Kepala BRPPUPP Palembang)*

**Penyusun :**

*Rully Ismanto, S.Si*

*Sri Mulyani, S.Kom*

*Nurwanti, S.I.Kom., M.Si*

*Dr. Dina Muthmainnah, S.Si., M.Si*

*Acim Tirtana, S.E*

*Asstri Kurniawati, S.T, M.Si*

*Muthia Nurlestari Putri, S.Pi*

## SAMBUTAN

### *Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan*



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Syukur Alhamdulillah bahwa RENSTRA Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang telah dapat diselesaikan. Terimakasih dan apresiasi saya sampaikan kepada tim penyusun dan seluruh kontributor yang telah bekerja keras menyelesaikan dokumen ini.

Perikanan perairan umum mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, melalui peningkatan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan terus melakukan langkah-langkah strategis dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan lokal dan global serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut telah disusun visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan program kegiatan riset selama 5 tahun. Untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya ikan perairan umum daratan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan

RENSTRA BRPPUPP ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta pengembangan kebutuhan sarana-prasarana dan sumberdaya manusia ke depan. Untuk itu disusun sebagai suatu dokumen yang akan menjadi acuan bagi peneliti dan semua unsur penunjang dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan IPTEK untuk mencapai tujuan pembangunan sektor perikanan di perairan umum Indonesia.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Plt. Kepala Balai



*Rezki Antoni S*

Rezki Antoni S

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Kondisi Umum

C. Potensi

D. Permasalahan

E. Lingkungan Strategis

F. Isu –isu Strategis

### **BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

A. Visi

B. Misi

C. Tujuan

D. Sasaran Strategis

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

A. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan KP

B. Arah Kebijakan dan Strategi BRPPUPP

C. Kerangka Regulasi

D. Kerangka Kelembagaan

### **BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

A. Target Kinerja

B. Kerangka Pendanaan

### **BAB V. PENUTUP**

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) tahun 2020-2024, di mana keduanya mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dan didalamnya juga mengatur tentang pembentukan Pusat

Riset Perikanan dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP adalah melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung dengan jumlah penyuluh sebanyak 504 orang. Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016.

## **B. Kondisi Umum**

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, salah satunya adalah perairan umum daratan. Perairan umum di Indonesia tercatat seluas 54 juta ha, terdiri dari 12 juta ha sungai dan rawa, 2,1 juta ha danau (alami dan buatan), dan 39,9 juta ha perairan rawa pasang surut. Perairan umum mempunyai posisi strategis dan berfungsi serba guna, selain dimanfaatkan oleh sektor perikanan juga dimanfaatkan oleh sektor Pekerjaan Umum, perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi, perhubungan dan pemukiman (Ilyas *et al*, 1990).

Perairan umum daratan terdiri dari sungai, rawa (rawa banjir, rawa gambut dan rawa pasang surut), estuaria, danau dan waduk serta genangan air lainnya. Sungai merupakan perairan yang mengalir (*lotic water*), memiliki karakteristik mengalir searah dari hulu ke hilir, aliran bagian hulu lebih deras dari pada yang hilir (Ewusie, 1990; Odum, 1993). Sungai-sungai besar banyak tersebar di Sumatera,

Kalimantan dan Papua. Keanekaragaman ikan di sungai cukup tinggi sebagai contoh di DAS Kapuas telah ditemukan lebih dari 300 jenis ikan, di DAS Barito lebih dari 110 jenis, sedangkan di DAS Musi lebih dari 200 jenis (Dudley, 1996; Husnah *et al.*, 2008). Tiap tipe ekosistem sungai bagian hulu, tengah dan hilir mempunyai jenis ikanyang khas. Jenis ikan khas di hulu sungai (*up-stream*) sebagai contoh ikan Semah (*Tor douronensis*), bagian tengah (*middle-stream*) yaitu ikan Belida (*Chitala lopis*), dan bagian hilir (*lower-stream*) yaitu Sembilang (*Paraplotosus albilabris*) (Utomo, *et al* 2007). Keanekaragaman jenis ikan penghuni sungai cukup tinggi, namun belum ada data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini karena penelitian masih bersifat spasial.

Setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005-2009, pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada RPJMN II 2010-2014 semakin menjadi arus utama. Demikian pula dengan sub sektor perikanan tangkap di dalamnya, baik itu perikanan tangkap di laut maupun di perairan darat (PD). Pelaksanaan pengarusutamaan tersebut mengacu kepada tema RPJMN II sebagaimana telah tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yakni “memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian”. Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN dimaksud menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan diadopsi menjadi Renstra Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

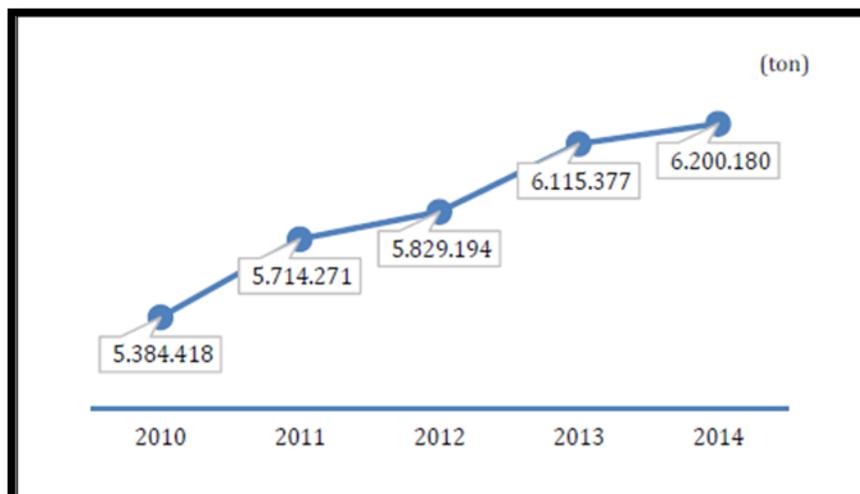
Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. BRPPUPP Palembang memiliki penyuluh perikanan sebanyak 504 orang dimana 297 orang PNS dan 207 orang penyuluh bantu yang tersebar di 5 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

### **C. Potensi**

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei.

Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor.

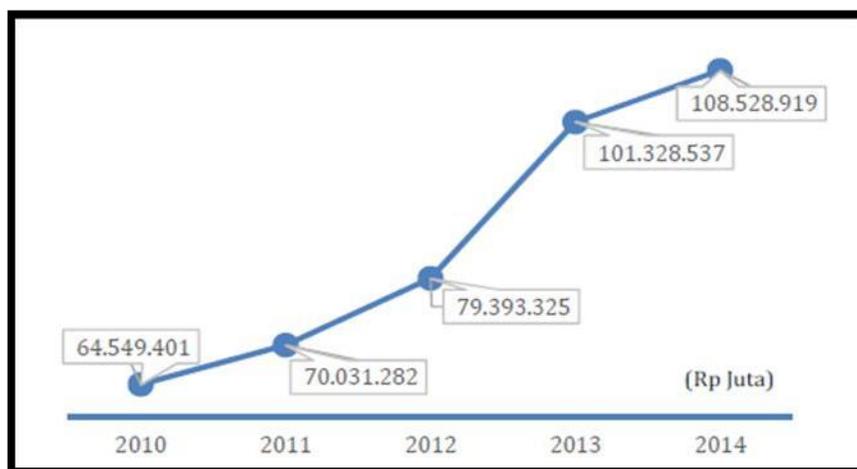
Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun, yaitu 5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap didominasi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%) sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%).



(Dirjen Tangkap KKP, 2015)

Gambar 1. Volume produksi perikanan tangkap tahun 2010 – 2014.

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 triliun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut. Untuk lebih jelasnya capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2010-2014 ditampilkan dalam gambar dan tabel berikut.



(Dirjen Tangkap KKP, 2015)

Gambar 2. Nilai produksi perikanan tangkap tahun 2010 – 2014.

Tabel 1. Nilai produksi perikanan tangkap laut dan perairan pedalaman tahun 2010-2014

Satuan: Rp Juta

<b>Nilai Produksi (Rp Juta)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Rata-rata pertahun (%)</b>
Total	64.549.401	70.031.283	79.393.325	101.328.538	108.528.920	10,60
Laut	59.580.474	4.452.537	72.016.210	93.186.165	99.900.360	10,70
Perairan pedalaman	4.968.927	5.578.746	7.377.115	8.142.373	8.628.560	9,52

(Dirjen Tangkap KKP, 2015)

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/ perairan umum dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen penting dalam keberlanjutan perikanan perairan umum itu sendiri.

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi

Penyuluh Pusat. Terhitung mulai 01 Januari 2018 penyuluh perikanan secara administrasi dibagi menjadi 9 Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang tersebar di Indonesia.

#### **D. Permasalahan**

##### **1. Degradasi Lingkungan**

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya tingkat kesejahteraan berdampak pada perubahan tata guna lahan/perairan yang mempengaruhi mutu lingkungan habitat ikan, menyempitnya kawasan perikanan tangkap, rusaknya tempat pemijahan (*spawning ground*), pencemaran bahan beracun, bahkan terganggunya ruaya ikan. Perubahan iklim global baik pemanasan, pendinginan ataupun perubahan siklus musim hujan-kemarau juga akan mempengaruhi siklus hidup ikan.

##### **2. Penangkapan yang tidak bijaksana**

Meningkatnya jumlah penduduk dan pengguna wilayah perairan umum menjadikan tingkat pemanfaatan meningkat. Salah satunya adalah kegiatan penangkapan yang diperuntukan baik untuk peruntukan konsumsi rumah tangga atau komersial perdagangan. Tingkah laku penangkapan yang semakin intensif mendorong masyarakat berlomba mendapatkan produksi maksimal yang sudah tidakberimbang dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini menjadikan timbul kegiatan penangkapan yang membahayakan, baik untuk nelayan itu sendiri dan sumber daya ikan ke depan. Kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak bijaksana yaitutangkap lebih maupun penggunaan alat tangkap berbahaya, menggunakan bahan peledak dan beracun akan berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Kegiatan penangkapan merusak juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan baik secara permanen atau sementara, baik menimbulkan dampak yang dapat direduksi atau tidak tereduksi.

##### **3. Persaingan pemanfaatan perairan umum**

Perairan umum merupakan perairan multi guna yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor pembangunan (multisektor) sehingga dapat terjadi persaingan dalam

pemanfaatan yang didasarkan atas kepentingan masing-masing sektor. Dampak yang mungkin terjadi meliputi reklamasi/pengeringan rawa untuk pertanian, reklamasi untuk pemukiman, pembuatan bendungan, dan pembuangan limbah baik dari kegiatan rumah tangga, pertanian, pariwisata maupun industri yang semuanya dapat mengganggu kehidupan ikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan yang dampaknya dapat diklasifikasikan menjadi a). Tingkat tekanan tinggi, b) Tingkat tekanan sedang, c). Tingkat tekanan rendah, dan d). Dampak yang belum kelihatan nyata.

- **Tingkat tekanan tinggi**

Indikator perairan mendapat tekanan tinggi yaitu ada pencemaran bahan organik dan anorganik di atas ambang batas mutu air; ditandai terjadi kematian ikan yang berulang kali, alih fungsi lahan kelihatan jelas; di sekitar perairan banyak terdapat industri dan perumahan penduduk, mengalami pendangkalan, sulit mendapatkan ikan asli, profesi nelayan banyak beralih ke profesi lain, hasil tangkapan hanya untuk keperluan rumah tangga atau pasar lokal. Contoh perairan umum mendapat tekanan tinggi adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, Sungai Citarum, Waduk Cirata, dan Danau Rawa Pening.

- **Tingkat tekanan sedang**

Perairan yang mendapat tekanan sedang ditandai pencemaran bahan organik dan anorganik secara temporal dan parsial pada bagian perairan tertentu, terjadi dampak kematian ikan namun tidak lama kemudian baik kembali, alih fungsi lahan sudah kelihatan pengaruhnya, pengelolaan oleh kearifan lokal masih ada, masih banyak jenis ikan asli namun populasinya cenderung menurun, ada jenis ikan sudah langka bahkan punah, dan masih dijumpai nelayan tetap yang kehidupannya tiap hari mencari ikan dimana hasil tangkapan di samping untuk keperluan sendiri juga dipasarkan ke luar daerah baik dalam bentuk segar maupun olahan. Contoh Perairan Darat yang Sumber Daya ikan sudah mendapat tekanan sedang antara lain Sungai Musi, Sungai Batanghari Jambi, Sungai Barito, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Kedung Ombo, Danau Laut Air Tawar, Danau Toba, dan Danau Maninjau.

- **Tingkat tekanan rendah**

Perairan mendapat tekanan rendah ditandai pencemaran bahan organik dan organik yang baru sedikit, alih fungsi lahan mulai kelihatan pengaruhnya, jauh dari perkotaan, masih banyak jenis ikan asli namun sudah terjadi penurunan populasi pada jenis tertentu, masyarakat yang tinggal di perairan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tetap, hasil tangkapan bukan hanya untuk keperluan sendiri namun juga dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk segar maupun olahan, dan pengelolaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Contoh perairan yang mendapat tekanan rendah yaitu kawasan Danau Sentarum Kalimantan Barat, Waduk Koto Panjang, dan Waduk Riam Kanan.

- **Dampak tekanan belum kelihatan nyata**

Sangat sedikit perairan yang tekanannya belum kelihatan nyata, umumnya terletak di daerah pedalaman, jauh dari sumber pencemaran, kekayaan jenis ikan asli masih tinggi, bahkan masih ditemukan ikan yang tergolong langka, dikelola ketat berdasarkan peraturan adat setempat secara turun menurun, dan seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar perairan merupakan nelayan tetap, contohnya di Danau Belaram dan Danau Empangau, Kalimantan Barat.

#### **4. Ketersediaan dan kompilasi data yang valid pengelolaan perikanan masih terbatas.**

- Pencatatan data masih terspasial dan terpisah belum terintegrasi dan belum ada platform untuk pencatatan data Perairan Darat
- Stakeholder Perairan Darat terdiri dari usaha perikanan kecil yang sangat banyak jumlahnya dan hasilnya banyak yang dikonsumsi secara mandiri.
- Perikanan Perairan Darat lebih banyak bersifat parttime job dibanding pekerjaan utama.
- Hasil dari perikanan Perairan Darat kecil dan biasanya Undervalue.
- Perikanan Perairan Darat didominasi oleh masyarakat kurang mampu dan berpendidikan kurang.

## 5. Penyuluhan Perikanan

Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- a. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;
- b. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- c. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
- d. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- e. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- a. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- b. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- c. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai ;
- d. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- e. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- f. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- g. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;

- h. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

## **E. Lingkungan Strategis**

Pemantapan kesiapan bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2024 ditujukan dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan daya saing, ketahanan pangan dan kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran strategis pembangunan perikanan untuk perairan darat mengacu pada Rencana Strategi dan Program Terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatnya peranan perikanan perairan umum terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
2. Meningkatnya kapasitas sentra produksi perikanan perairan umum yang memiliki komoditas unggulan disesuaikan dengan jenis dan habitat.
3. Meningkatnya pendapatan nelayan dan ketersediaan hasil perikanan.
4. Terwujudnya pengelolaan sumber daya perikanan perairan umum dan konservasi habitat spesifik secara berkelanjutan.

## **F. Isu –isu Strategis**

Dalam upaya mempertahankan keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah pengelolaan yang didasarkan atas hasil penelitian/kajian. Karena sifat perairan umum daratan berupa kumpulan badan air yang terpisah satu sama lain perlu dilakukan karakterisasi masing- masing tipe badan air serta permasalahan yang mungkin timbul.

Dari hasil penelitian/kajian dilanjutkan dengan tindakan pengelolaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konservasi habitat, bioremediasi, restorasi ekosistem, pengkayaan stok, perbenihan dan budidaya

serta rekayasa sosial. Di samping itu diperlukan peraturan dan kelembagaan yang dapat mengatur penangkapan, pengolahan/pascapanen dan tata ruang.

Terkait dengan penyuluhan perikanan, perlu adanya penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mampu memanfaatkan iptek untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing dengan didukung oleh tata kelola yang baik (*good governance*). Para pelaku usaha KP perlu difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, akses terhadap permodalan, pemasaran hasil dan akses terhadap teknologi serta informasi, termasuk peningkatan kemampuan dalam menjalankan co-management pengelolaan sumberdaya KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional dengan kuatnya ketahanan pangan, tingkat kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat diperlukan pembangunan fundamental berdasarkan kajian yang terukur dan dapat di implementasikan *stakeholder* perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pelaksana dalam pengkajian sumberdaya dan pemanfaatan perikanan khususnya wilayah daratan bertanggung jawab secara langsung guna memberikan kajian, analisa, data, dan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam pembangunan perikanan daratan. Visi BRPPUPP Berdasarkan Visi pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga mengacu visi Presiden 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Dari visi Presiden kemudian ditetapkan visi KKP 2020-2024 untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden. Visi KKP 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Selanjutnya BRSDM KP untuk mendukung visi KKP menetapkan visi BRDSM KP 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi Pusat Riset Perikanan adalah **“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong melalui riset dan inovasi iptek perikanan”**. Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera**

**dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Adapun keinginan tersebut dituangkan dalam visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut:

**“Mewujudkan Sains Dan Teknologi Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kelestarian dan Pemanfaatan yang Berkesinambungan”**

## **B. Misi**

Dalam pencapaian Visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
2. Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan;
3. Melakukan penelitian bio-ekologi ikan di perairan umum daratan;
4. Melakukan penelitian daya dukung perairan darat untuk kegiatan penangkapan , penebaran ikan, dan budidaya ikan.
5. Meningkatkan pemanfaatan praktis hasil penelitian melalui diseminasi, simposium dan workshop kepada stakeholder;
6. Menyebarluaskan informasi dan teknologi hasil penelitian dalam berbagai bentuk publikasi ilmiah dan semi ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. BRPPUPP memiliki tugas Melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, dengan fungsi /uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;

2. Pelaksanaan riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan perairan umum daratan;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

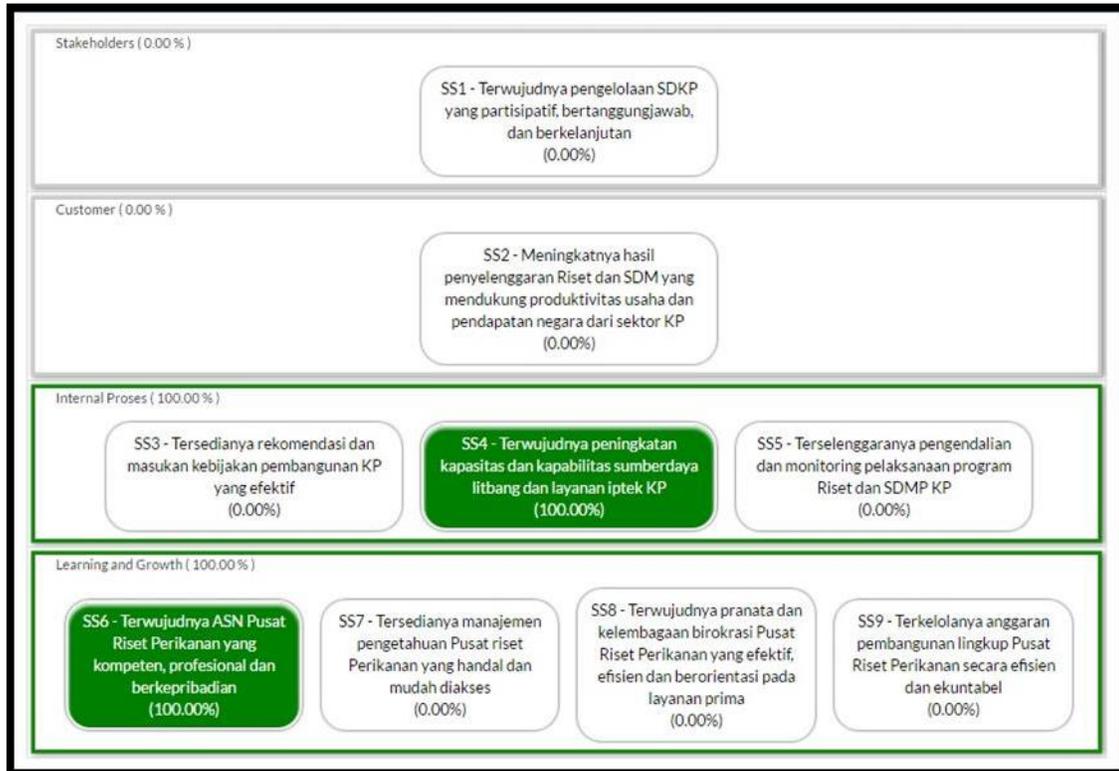
### **C. Tujuan**

Sesuai dengan Visi dan Misi BRPPU-PP yang telah dijelaskan tersebut di atas bertujuan untuk:

1. Melestarikan Sumber plasmanuftah perikanan di perairan umum daratan
2. Melestarikan dan memelihara kesehatan lingkungan ekosistem perairan umum daratan
3. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan
4. Meningkatkan kesejahteraan nelayan di perairan umum daratan
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM untuk melakukan riset.
6. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana riset
7. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umu daratan

## D. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BRPPUPP tahun 2020-2024 berdasarkan tujuan yang akan dicapai dibagi dalam empat prespektif yaitu:



Gambar 2.1. Sasaran Strategis BRPPUPP tahun 2020 - 2024

### 1. Stakeholders

Menjabarkan misi "Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan", maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah " Hasil Riset BRPPUPP yang dimanfaatkan", dengan indikator kinerja:

- Data dan informasi hasil riset BRPPUPP yang digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan. Dilakukan dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan, serta melibatkan instansi terkait dan masyarakat setempat.

-

### 2. Customer

Menjabarkan misi " Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan", maka sasaran strategis ke dua (SS-2) yang akan dicapai

adalah " Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPPUPP", dengan indikator kinerja:

- a. Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI di Perairan Darat (WPP NRI PD).
- b. Karya Tulis Ilmiah BRPPUPP yang dipublikasikan adalah 20.

### **3. Internal Process**

Dalam internal process memiliki 3 sasaran strategis. Untuk Sasaran strategis ke 3 (SS-3) adalah " Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset BRPPUPP". Didalam SS-3 ini terdiri dari:

- Sarana dan Prasarana BRPPUPP yang ditingkatkan kapasitasnya.

Sasaran strategis ke 4 (SS-4) adalah "Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPPUPP". Yang didalamnya terdiri dari :

- Sertifikasi Kelembagaan BRPPUPP.

Sasaran strategis ke lima (SS-5) adalah " Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada BRPPUPP ". Didalamnya terdapat delapan IKU yaitu :

- a. Jejaring dan/atau Kerjasama BRPPUPP yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti
- b. Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP
- c. Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BRPPUPP
- d. Nilai IKPA BRPPUPP
- e. Presentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BRPPUPP
- f. Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP
- g. Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP
- h. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP

Untuk Kegiatan Penyuluhan Perikanan, sasaran strategis yang ingin dicapai BRPPUPP adalah:

#### **1. Customer**

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah "Pendampingan kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP", dengan indikator kinerja:

- a. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPUPP dengan target untuk tahun 2021 adalah 175 kelompok.
- b. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP sebanyak 112 kelompok selama tahun 2021.

Sasaran strategis Ke-dua (SS-2) yang akan dicapai adalah "Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar", dengan indikator kinerja:

- a. Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP Palembang pada tahun 2021 sebanyak 1 unit

## **2. Internal Process**

Dalam internal process memiliki 2 sasaran strategis. Untuk Sasaran strategis ke 3 (SS-3) adalah "Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan". Didalam SS-3 ini terdiri dari:

- a. Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BRPPUPP sebanyak 4.853 Kelompok.
- a. Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BRPPUPP sebanyak 1 Unit.

Sasaran strategis Ke-empat (SS-4) yang akan dicapai adalah "Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BRPUPP". Didalam SS-4 ini terdiri dari :

- a. Persentase layanan dukungan manajemen internal Penyuluhan KP – BRPPUPP adalah 100 %.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**A. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan KP**

Program Terobosan KKP Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan memberi pemasukan lebih optimal bagi keuangan negara dari sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2021-2024 memiliki 3 (tiga) program terobosan, yaitu :

- 1) Meningkatkan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan Kesejahteraan nelayan;
- 2) Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat;
- 3) Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Ketiga program terobosan tersebut telah selaras dengan RPJMN 2020-2024, misi dan arahan Presiden, dan arah 5 (lima) kebijakan KKP yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2024. Untuk mendukung implementasi program ketiga terobosan KKP tersebut, maka penyelarasan program melalui inisiatif strategis sebagai berikut :

**1. Meningkatkan PNBP dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:**

- a. Pengkajian stok sumber daya ikan pada 11 WPPNRI termasuk sumber daya tuna di RFMO (WCPFC, IOTC dan CCSBT) serta; 14 WPPNRI-PD
- b. Pengkajian aspek perikanan (area tangkap, kapal ikan, alat tangkap dan musim ikan) dan model pengelolaan untuk keberlanjutan sumber daya ikan;
- c. Pengembangan teknologi untuk efisiensi penangkapan dan ramah lingkungan;
- d. Peningkatan kapasitas riset dan Kerjasama dengan berbagai stakeholder (LN, DN, NGO, Pemda, PT, Asosiasi dan swasta).

**1. Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat. Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:**

- a. Mengembangkan paket teknologi budidaya (benih/bibit, pakan, lingkungan budidaya, Kesehatan ikan dan lain lain) pada komoditas ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai produksi;
- b. Melakukan hilirisasi teknologi iptek budidaya komoditas unggulan budidaya kepada pelaku usaha pada level industri maupun masyarakat;
- c. Mengembangkan teknologi rancang bangun untuk peningkatan nilai produk perikanan;
- d. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk berbagai komoditas budidaya unggulan (lobster, rumput laut, kepiting dan rajungan);
- e. Peningkatan kapasitas riset dan Kerjasama dengan berbagai stakeholder (LN, DN, NGO, Pemda, PT, Asosiasi dan swasta);
- f. Melakukan riset terkait daya dukung lingkungan untuk pengembangan komoditas budidaya potensial;
- g. Melakukan riset terkait pemetaan potensi lahan budidaya.

**2. Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Inisiatif strategis yang akan dilakukan sebagai berikut:**

- a. Pengembangan domestikasi ikan endemik (koleksi, karakterisasi-inventarisasi, domestikasi, seleksi/ hibridisasi);
- b. Pengembangan paket teknologi budidaya (benih, pakan, lingkungan budidaya, kesehatan ikan, dan lain-lain) pada komoditas ikan untuk ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. Hilirisasi teknologi iptek budidaya komoditas ketahanan pangan untuk model di masyarakat;
- d. Memberikan pendampingan dalam upaya revitalisasi UPR dengan memberikan benih unggul sehingga masyarakat bisa mengadopsi teknologi budidaya yang dikembangkan untuk memperoleh benih unggul;

- e. Pengembangan inovasi budidaya perikanan yang menghasilkan paket teknologi (benih, pakan, lingkungan budidaya, kesehatan ikan, dll) pada komoditas ikan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan masyarakat;
- f. Hilirisasi dan komersialisasi teknologi iptek budidaya untuk ketahanan pangan dan aplikasi model di masyarakat;
- g. Peningkatan kapasitas riset dan Kerjasama dengan berbagai stakeholder (LN, DN, NGO, Pemda, PT, Asosiasi dan swasta).

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi BRPPUPP**

### **B.1 Arah Kebijakan BRPPUPP**

Arah kebijakan penelitian BRPPUPP Palembang hingga tahun 2024 adalah penelitian untuk menghasilkan nilai potensi sumberdaya perikanan perairan umum daratan. Parameter utama yang akan dievaluasi yaitu **1). Parameter utama** : stok ikan, potensi produksi, potensi lestari dan tangkapan ikan. **2). Parameter pendukung: biologi ikan, lingkungan, kualitas air.** Keempat faktor yang ada diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi dan kajian ilmiah mengenai:

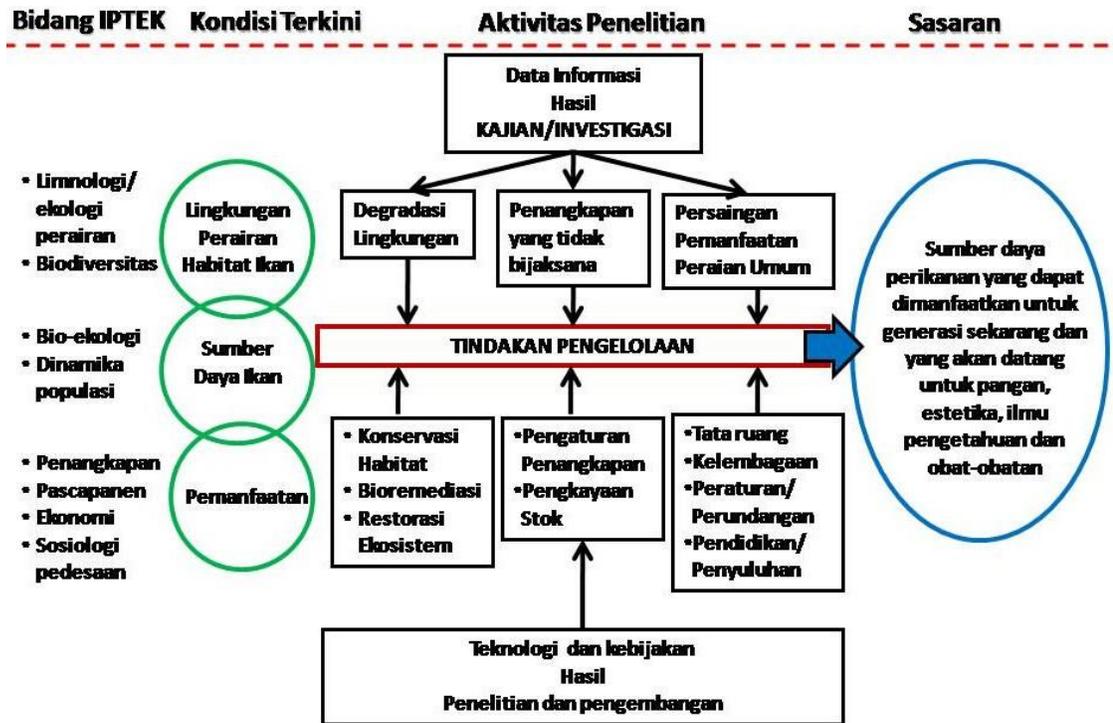
- a. Kajian stok ikan akan menggambarkan jumlah dan jenis ikan pada area yang diteliti.
- b. Kajian potensi produksi akan menggambarkan kemampuan perairan untuk menghasilkan ikan, juga menggambarkan peluang pemanfaatan relung ekologi untuk penebaran.
- c. Potensi lestari akan menggambarkan seberapa besar ikan yang dapat dimanfaatkan agar tetap lestari.
- d. Tangkapan ikan-ikan oleh nelayan akan menggambarkan seberapa besar ikan yang sudah tertangkap oleh nelayan.

Keempat parameter utama **beserta parameter pendukungnya** tersebut merupakan landasan dalam pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum daratan. Dari keempat parameter **beserta parameter pendukungnya** diharapkan BRPPUPP dapat memberikan rekomendasi konkrit suatu wilayah perairan darat dalam kerangka pengelolaan yang berkesinambungan dan kegiatan perikanan yang berkelanjutan kepada stakeholder yang bersinergi.

Paket teknologi/kebijakan pola pengelolaan perikanan perairan umum disusun berdasarkan komponen penelitian jangka pendek dan menengah untuk mencapai sasaran “Sumber daya perikanan perairan umum yang dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan yang akan datang untuk pangan, estetika, ilmu pengetahuan dan obat-obatan”. Langkah-langkah pengelolaan perikanan perairan umum tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.

Perikanan secara keseluruhan digambarkan oleh adanya tiga komponen sinergitas utama yaitu Lingkungan perairan habitat ikan, Sumber daya ikan, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Dari ketiga komponen ini diperlukan adanya instrument pengukur yang bersumber dari penelitian berupa data dan informasi. Data dan informasi tersebut bersumber dari 3 permasalahan utama dalam pengelolaan PD khususnya yaitu:

- a. Degradasi lingkungan yaitu riset ditujukan dalam menuju konservasi sumber daya, bioremediasi, dan restorasi ekosistem.
- b. Penangkapan yang tidak bijaksana yaitu dengan pengaturan penangkapan, dan pengkayaan stok.
- c. Persaingan pemanfaatan perairan umum yaitu dengan tata ruang, kelembagaan, peraturan/ perundangan, pendidikan dan penyuluhan.



Gambar 4. Bagan alir langkah-langkah pengelolaan perikanan perairan umum.

Sumberdaya perikanan perairan umum daratan bersifat unik (spesifik), tergantung lokasi geografisnya; dimanfaatkan oleh berbagai sektor pemanfaat (pertanian, pekerjaan umum, pertambangan, kehutanan, perikanan, perhubungan dan pariwisata) sehingga dalam pemanfaatan dan pengelolaannya harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki serta sektor-sektor yang terlibat. Secara geografis perairan umum daratan Indonesia dapat dibedakan atas perairan yang berada di Paparan Sahul, Kawasan Wallacea dan Paparan Sunda. Perairan umum daratan yang berada di tiga kawasan yang berbeda tersebut terdiri dari empat tipe ekosistem yaitu ekosistem sungai dan rawa banjiran, danau, waduk, dan rawa. Keempat tipe ekosistem tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda baik faktor biotik maupun abiotiknya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan perikanan dan konservasi sumberdaya ikan di ke tiga kawasan dan ke empat tipe ekosistem tersebut akan berbeda pula. Untuk keperluan tersebut, penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD) adalah sangat penting dilakukan (Gambar 5).



Gambar 5. Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD).

Fokus kegiatan penelitian BRPPUPP Palembang hingga tahun 2024 adalah melakukan kajian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan, yang meliputi sungai, danau, waduk dan rawa. Kajian potensi sumberdaya ikan meliputi pendugaan stok ikan, potensi produksi, potensi lestari dan tangkapan ikan. Wilayah penelitian PD mengacu pada konsep Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Perairan Darat (WPPNRI PD).

Ekosistem dan interaksinya dalam WPPNRI PD sendiri sangat kompleks dan beragam. Seperti dijelaskan di awal bahwa perairan umum terdiri dari beberapa tipe ekosistem yaitu sungai, rawa banjir, waduk, danau dan estuaria. Setiap ekosistem memiliki kekhususan dan ciri khas yang berbeda dari satu hal dengan hal yang lain.

## B.2 Strategi Pencapaian

### a. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan

Tiap ekosistem perairan umum daratan di danau, waduk, sungai dan rawa mempunyai karakteristik stok ikan yang berbeda, disamping itu kondisi bio fisik masing-masing ekosistem juga berbeda. Dengan demikian untuk melakukan kajian

stok ikan pada masing-masing ekosistem diperlukan pendekatan yang berbeda. Pendugaan stok ikan perairan yang dalam seperti waduk, danau dan sungai besar menggunakan pendekatan “*sounding*” dengan peralatan yang digunakan adalah seperangkat alat akustik. Sedangkan pendugaan stok ikan di perairan yang dangkal seperti anak sungai dan rawa menggunakan pendekatan “sapuan” (*swept area*). Agar capaian tercapai dengan baik maka bentuk kelompok penelitian perlu fokus pada kajian stok ikan berdasarkan ke empat ekosistem yaitu: danau, waduk, sungai dan rawa.

Didalam lampiran Renja Bappenas 2015 – 2019, dan direvisi pada rencana kerja pemerintah (RKP) 2016 bahwa riset perikanan harus menyediakan data dan informasi mengenai kondisi stok dan potensi sumberdaya 14 WPPNRI PD hingga tahun 2024. Dalam mendapatkan nilai stok dan potensi diperlukan keempat parameter yang telah ditetapkan. Adapun rencana pelaksanaan penelitian pada ke14 lokasi WPPNRI PD Indonesia adalah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Rencana kegiatan kajian stok dan potensi **WPPNRI PD**.

No.	Kegiatan WPPNRI PD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 439			√	√	√
2	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 438	√	√	√	√	√
3	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 431				√	√
4	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 432			√	√	√
5	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 433	√	√		√	√
6	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 434			√	√	√

7	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 421	√	√		√	√
8	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 422	√			√	√
9	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 435				√	√
10	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 436	√			√	√
11	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 437		√		√	√
12	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 411	√			√	√
13	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 412	√			√	√
14	Kajian Stok dan Potensi Sumber Daya Ikan di KPP PUD 413	√	√		√	√

## **b. Peningkatan Manajemen BRPPUPP**

### **1. Peningkatan nilai PNBP**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penghasilan lain pemerintah diluar APBN yang bersumber dari pajak masyarakat. Adanya PNBP diperoleh dari kegiatan pelayanan jasa, niaga atau perdagangan yang dilakukan instansi pemerintah dengan tarif yang telah diatur dalam perundangan. Peningkatan nilai PNBP dapat menjadikan nilai tambah suatu instansi untuk memperoleh pemasukan dari kegiatan/ aktivitas yang dilakukannya. Pemerintah memacu guna peningkatan perolehan PNBP dimaksudkan dengan, peningkatan ini menjadikan instansi pemerintah dapat memiliki pendapatan yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan organisasi tanpa membebani anggaran pemerintah.

BRPPUPP adalah lembaga yang bergerak dalam bidang riset dan dukungan kebijakan memiliki potensi peningkatan PNBP didalamnya. Potensi tersebut datang dari beberapa hal diantaranya:

- a) Penerimaan dari pelayanan jasa riset yaitu jenis analisa laboratorium dan jasa fasilitas riset.
- b) Jasa alih teknologi yaitu jasa pelayanan magang bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
- c) Jasa fasilitas riset yaitu jasa peminjaman dan pengoperasian alat-alat riset untuk kepentingan penelitian atau perkuliahan.
- d) Penerimaan jasa penggunaan fasilitas *guest house/ mess/* dan wisma.

Peningkatan nilai PNBP merupakan indikator yang menunjukkan presentase peningkatan PNBP dari hasil penyelenggaraan riset dan SDM dibandingkan dengan hasil tahun lalu. Nilai peningkatan PNBP dapat dihitung melalui jumlah hasil PNBP tahun berjalan dibandingkan dengan hasil PNBP tahun lalu, dengan target meningkat 10 % dibandingkan tahun lalu.

## **2. Peningkatan Proporsi Fungsional**

Jumlah jabatan fungsional adalah penting untuk lembaga seperti halnya BRPPUPP, selain adanya Jabatan administratif (JA). BRSDMDKP memiliki 8 jenis jabatan fungsional secara keseluruhan. Kontribusi jumlah fungsional BRPPUPP akan banyak disumbang oleh jumlah fungsional peneliti dan teknisi.

Dalam perkembangannya, BRPPUPP akan berusaha meningkatkan jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional sebagai penunjang aktivitasnya. Potensi penambahan jumlah pegawai fungsional dapat diperoleh dari jumlah Teknisi non kelas yang belum mengambil kelas fungsional peneliti, pustakawan, arsiparis dan perencana.

Nilai proporsi fungsional merupakan perbandingan antara jumlah pegawai fungsional BRPPUPP dengan jumlah pegawai BRPPUPP.

### 3. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana

Guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan penambahan fasilitas berupa pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu berupa pengadaan bangunan, peralatan laboratorium atau peralatan perkantoran. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BRSDM.

Adapun beberapa sarana dan prasarana yang direncanakan akan diadakan hingga tahun 2024.

Tabel 4. Kebutuhan pembangunan dan fasilitas gedung/kantor

No	Kegiatan	Uraian
1.	Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan Laboratorium di Jakabaring , Mariana dan Stasiun Riset Patratani</li><li>- Pekerjaan Menara Torrent</li><li>- Pembuatan Kolam Retensi</li><li>- Tandon air</li><li>- IPAL</li><li>- Exhibition hall untuk akuarium, maket, miniatur alat tangkap, dan poster</li></ul>
2.	Fasilitas Kantor	Fasilitas perkantoran SEAFDEC dan Patratani
3.	Revitalisasi bangunan/sapras	Revitalisasi bangunan gedung Jakabaring (SEAFDEC) dan Stasiun Patratani

Tabel 5. Kebutuhan pendukung kendaraan lapangan

No	Kelompok Kendaraan	Uraian
1.	Mobil Laboratorium uji	Double gardan (4 WD)
2.	Mobil Angkutan Pegawai	
3.	Kendaraan roda tiga	Pengangkutan pakan dan benih
4.	Kapal Penelitian	Body baja/aluminium, mesin inboard 40 PK, panjang 12 meter, lebar 3 meter

5.	Sepeda motor trail	Yamaha 125 cc
6.	Perahu karet	Kapasitas 6 orang; Mesin 25 pk dan dayung

Tabel 6. Kebutuhan alat pengukuran dan analisis fisika-kimia-biologi (2020-2024)

No	Kelompok Instrumen	Nama Alat
<b>A. Laboratorium Kimia Perairan</b>		
1.	Alat Sampling	Water Sampler (Acrylic 2.2 L).
2.	Alat Ukur Insitu	Dissolve Oxygen multiparameter long cable (DO, pH, Temperature, Conductivity, Salinity); Deep Sounder; Termometer Digital; pH digital pH 5+ dan pH 6+; Refractometer; CTD Midas; Turbidity Meter; TDS tester; Current meter.
3.	Alat Laboratorium	Autoclave; Timbangan Digital; Waterbath; AAS Graffit; GC-MS; HPLC; Drying Oven; Stirer; Centrifuge; Desicator Glass Large Size; Vacum pump; Furnace 2592 cu in capacity; Fume Hood Lab-200 Multitriplex termasuk blower; Refrigerator; Digestion AIM 600 Programabel System; Water Purification System Direct –Q3 Merck Millipore; Shakers Max Q2000 & 2000 Open Air Platform Shaker; Hotplate IKA C-MAG HP10; Erlenmeyer Scoot Duran 250 ml; Winkler Botle 300 ml; Pipet Skala 5 ml, 2 ml dan 1 ml; Buble bub; Spektrofotometer Uv-vis.
4.	Peralatan Analisis Sedimen	Reusable polysulfone holder with funnel and reciver; Vacum Fitratio manifold; Gravalometer; Soil Hydrometer; Soil Sampling handle; T handle; Sampling Kit Soil sample; Dual action shakers; Universal Platform; Spring wire rack; Rubber mat; Kamera + tele lens; Under water camera.
5	Monitoring kualitas air	Paket alat elektronik (NOA)

	(data logger)	
--	---------------	--

Lanjutan Tabel 6.

No	Kelompok Instrumen	Nama Alat
<b>B. Laboratorium Biologi Ikan</b>		
1	Biologi Ikan	Freezer; Fish Tagging (30.000 tags) berbagai macam ukuran; Inverted Mikroskop; Kaca pembesar + Lampu; Cosview Mikroskop; Alat persiapan preparat (Microscope slide "sail brand", coverglases asisstant); Toples Luminarc; Glass Ware Petri Dish; Alat akustik; Electro fishing; Tabung oksigen 1 kubik.
2	Biologi Molekuler	Autoclave; Drying Oven; Fume Hood Lab-200 Multitriplex termasuk blower; Alat sampling DNA; Pinset "Precision Tweezers".
<b>C. Laboratorium Hydrobiologi</b>		
1	Alat Sampling	Deep Sounder; Plankton net 35 $\mu$ m; Flow meter; Bonggo net; GPS Garmin GPSMAP 76csx; Ekman Dredge; Range Finder; Current Meter; Secchi Disc; Hotplate; Desicator; Furnace; Surber net; Botol vial untuk plankton.
2	Alat Laboratorium	Fume Hood; Drying Oven; Hotplate; Cawan Porselin; Stereo Microscope dan Full Automatic Voltage Regulator (SVC-2000VA); Compond Microscope; Cosview microscope; Saringan Bentos; Kaca Pembesar dan lampu Luxo magnifying lamp with 3D and 3,5 D; Sedwigck Rafter Cell yang berskala; Pinset.

#### **4. Peningkatan Proporsi kegiatan riset aplikatif dibandingkan total kegiatan riset PUSRISKAN:**

Sesuai dengan PP No 30 Tahun 2008, pasal 4 bahwa kegiatan penelitian dibagi ke dalam 3 kategori yaitu:

- a. penelitian dasar perikanan;
- b. penelitian terapan perikanan; dan/atau
- c. pengembangan eksperimental perikanan.

##### **Penelitian dasar perikanan:**

- a. Penelitian dasar perikanan merupakan kegiatan penelitian yang bersifat eksploratif dan/atau eksperimental untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru sebagai acuan bagi penelitian terapan perikanan.
- b. Ilmu pengetahuan baru tersebut dapat berupa data dan informasi ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar dari fenomena atau fakta serta interaksi keduanya yang teramati di bidang perikanan.

##### **Penelitian terapan perikanan;**

- a. Merupakan kegiatan penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian dasar perikanan, dan diarahkan untuk tujuan praktis guna memperoleh pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan
- b. Pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan dapat berupa pengetahuan praktis dan teknologi terapan yang langsung dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan
- c. Yang dimaksud dengan "penelitian terapan perikanan", antara lain desain, rancang bangun dan konstruksi, permodelan, pemetaan, dan pengkajian di bidang perikanan

##### **Pengembangan eksperimental perikanan**

- a. Merupakan kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada yang diperoleh melalui penelitian dasar perikanan dan/atau penelitian terapan perikanan, untuk memperoleh sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien serta menghasilkan produk unggulan di bidang perikanan.

- b. Sistem teknologi yang lebih efektif dan efisien dapat berupa teknologi yang sederhana, murah, terjangkau, adaptif, dan ramah lingkungan.
- c. Produk unggulan dapat berupa produk yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing tinggi, dan aman dikonsumsi serta terjangkau masyarakat luas.
- d. Yang dimaksud dengan "pengembangan eksperimental perikanan", antara lain, perikanan, *scaling-up*, dan inovasi teknologi di bidang perikanan.

Riset BRPPUPP berpedoman pada kebutuhan dari eselon I lain dalam rencana pengelolaan Kawasan Pengelolaan Perikanan Umum Daratan. Hal ini didorong guna meningkatkan ketermanfaatan hasil riset WPPNRI PD dalam kebijakan yang akan disusun di dalam Dirjen Teknis. Output ini diharapkan dapat menjadikan output keseluruhan balai menjadi riset terapan, dengan bentuk outcome berupa data-informasi dan rekomendasi yang akan digunakan secara pasti oleh Dirjen Teknis lingkup KKP, dan Dinas Daerah terkait.

#### **5. Peningkatan Kapasitas ASN lingkup BRPPUPP**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia BRPPUPP direncanakan dapat mencapai optimal pada 2024. Kegiatan peningkatan ini terbagi dalam beberapa kegiatan dan perencanaan seperti peningkatan pendidikan (formal), pelatihan teknis, *workshop* dan lainnya. Peningkatan kualitas aparatur ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah aparatur KKP yang telah dilatih dan lulus uji kompetensi serta yang telah melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (lulus pendidikan formal).

Beberapa perencanaan kebutuhan dan rencana kebutuhan pegawai BRPPUPP ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia di BRPPUPP (2020-2024).

No	Kualifikasi/Spesialisasi	Kebutuhan (orang)				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	S1/S2 Manajemen Sumberdaya Perairan	2	2	2	1	1
2	S1/S2 Biologi (Ikan dan Perairan)	1	2	2	2	1
3	S1/S2 Penangkapan		2		2	
4	S1/S2 Hidroakustik	2	3		3	
5	S1/S2 Sosial Ekonomi Perikanan		1		1	2
6	S1/S2 Perencanaan Wilayah, GIS			1		1
7	S1/S2 Kimia Lingkungan (Perairan)		2		2	
8	S1/S2 Permodelan Lingkungan/Hidrologi			1		1
9	S1/S2 Mikrobiologi				1	
10	S1/S2 Matematika/Statistika		1			
<b>TEKNISI LITKAYASA</b>						
1	D3 Perikanan	2		2	2	2
2	D3 Biologi	2	2	2		2
3	D3 Kimia Analis			2	2	
4	D3 Sistem Informasi	1			1	

5	D3 Elektronika/Instrumentasi					1	
---	---------------------------------	--	--	--	--	---	--

Tabel 8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (2020-2024).

No	Program	Sumber Daya Manusia				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pendidikan strata 2	1	2		2	
2.	Pendidikan strata 3			1		1
3.	Pelatihan Jangka Pendek	2	3	4	4	2
4.	Seminar dan <i>workshop</i>	6	5	5	2	2

## 6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi di BRPPUPP

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:

- (a) kelembagaan atau organisasi;
- (b) ketatalaksanaan atau business process; dan
- (c) sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan:

- a) integritas tinggi;
- b) produktivitas tinggi dan bertanggung jawab; dan
- c) kemampuan memberikan pelayanan yang prima.

Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi

adalah mengubah pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultural set*), serta sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada:

- a) Kelembagaan (organisasi);
- b) Budaya organisasi;
- c) Ketatalaksanaan (sistem, proses, prosedur kerja yang efisien dan efektif);
- d) Deregulasi birokrasi (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, kondusif);
- e) Sumber daya manusia (sdm yang kompeten, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera);
- f) Pengawasan internal (akuntabilitas kinerja); dan
- g) Peningkatan kualitas pelayanan publik

## **7. Peningkatan Publikasi /Karya Tulis Ilmiah (KTI)**

Publikasi merupakan tolok ukur kualitas suatu lembaga riset dalam menghasilkan suatu kajian dan pelaksanaan penelitian. Sesuai dengan PERKA LIPI No 4 Tahun 2012, bahwa Karya Tulis Ilmiah dapat dibagi kedalam empat bentuk yaitu: 1) Buku Ilmiah, 2) Bunga Rampai, 3) Majalah Ilmiah/ Jurnal Ilmiah, 4) Prosiding.

Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi BRPPUPP dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Pembentukan dewan evaluasi internal guna mensupervisi penulis BRPPUPP dalam menghasilkan KTI.
- b. Memperkuat basis riset sehingga diperoleh data yang baik, runut dan lengkap. Data yang berkualitas akan memudahkan terbentuknya KTI yang bermutu.
- c. Pembentukan kelompok-kelompok diskusi ilmiah dalam memacu potensi-potensi data yang dapat disusun sebagai KTI.
- d. Memetakan potensi dan kemampuan SDM BRPPUPP dan kesesuaian jurnal (bidang) yang dapat mengakomodir judul-judul KTI yang diproduksi.

## **8. Peningkatan Kapasitas dan Pelayanan Publik Lembaga**

Kemajuan kapasitas pelayanan lembaga pemerintah menjadi tujuan dalam pembangunan pemerintah. Berbagai potensi diharapkan dapat dioptimalkan oleh semua lembaga guna menyajikan bentuk pelayanan yang professional dan mencerminkan pelayanan publik yang baik. Beberapa strategi yang akan dilakukan BRPPUPP dalam mencapai kapasitas dan pelayanan publik yang baik adalah:

1. Laboratorium Pengujian Kantor Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum terakreditasi KAN. Peningkatan kapabilitas laboratorium dengan memperoleh akreditasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) meningkatkan hasil dan kepercayaan publik pada hasil analisa penelitian di BP3U. Dengan meningkatnya hasil analisa dari laboratorium, maka kualitas penelitian BP3U semakin meningkat.
2. Kantor BRPPUPP terakreditasi KNAPPP. Dalam mewujudkan instansi pemerintah yang professional, akuntabel dan beretos kerja tinggi, BRPPUPP berkomitmen memiliki standarisasi yang sesuai berdasarkan KNAPP (Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan).
3. BRPPUPP memenuhi pencapaian standart pelayanan sesuai dengan ISO 9001, dimana berdasarkan ini lembaga BRPPUPP dapat memberikan bentuk pelayanan yang terstandart, terkontrol dan dapat dipercaya.
4. BRPPUPP ditetapkan sebagai WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
5. BRPPUPP ditetapkan menjadi lembaga PUI (Pusat Unggulan Iptek).

### **C. Kerangka Regulasi**

Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.73 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. Pelaksanaan riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan ;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan perairan umum daratan ;
- d. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha ;
- e. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta ;
- f. Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan ;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

#### **D. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan PERMEN KP RI Nomor 73/PERMEN-KP/2020, struktur organisasi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai bertindak sebagai Koordinator yang membawahi: (i) Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional; (ii) Sub Koordinator Pelayanan Teknis dan Sarana; (iii) Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha; dan (iv) Sub Koordinator Kelompok Penyuluhan (v) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya. Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional membawahi dua Pelaksana Koordinasi, yaitu: (i) Pelaksana Koordinasi Program dan Anggaran (ii) Pelaksana Koordinasi Monitoring dan Evaluasi. Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis dan Sarana membawahi Pelaksana Koordinasi, yaitu (i) Pelaksana Koordinasi Pelayanan Teknis (ii) Pelaksana Koordinasi Prasarana dan Sarana. Selanjutnya Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha membawahi dua Pelaksana Koordinasi yaitu (i) Pelaksana

Koordinasi Urusan Keuangan dan Umum dan (ii) Pelaksana Koordinasi Urusan Kepegawaian. Untuk Subkoordinator Kelompok Penyuluhan membawahi dua Pelaksana Koordinasi yaitu : (i) Pelaksana Koordinasi Kelembagaan dan Kelompok, (ii) Pelaksana Koordinasi Penyelenggaraan.

**Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana; dan
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana.
- b. Urusan Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

**Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan.

Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional terdiri atas:

- a. Pelaksana Koordinasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran.
- b. Pelaksana Koordinasi Monitoring dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan.

**Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis dan Sarana** mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian perikanan perairan umum daratan, serta pengelolaan prasarana dan sarana penelitian.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis dan Sarana menyelenggarakan Fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, dan kerja sama penelitian perikanan perairan umum daratan; dan
- b. Pengelolaan prasarana dan sarana penelitian perikanan perairan umum daratan.

Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas:

- a. Pelaksana Koordinasi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerjasama peneliti perikanan perairan umum daratan, serta pengelolaan perpustakaan.
- b. Pelaksana Koordinasi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana penelitian perikanan perairan umum daratan.

**Sub Koordinator Kelompok Penyuluhan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan, penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta. Sub Koordinator Kelompok Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan; dan
- b. Penyiapan bahan penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta.

Sub Koordinator Kelompok Penyuluhan terdiri atas:

- a. Pelaksana Koordinasi Kelembagaan Kelompok mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan.

- b. Pelaksana Koordinasi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh swadaya dan swasta.

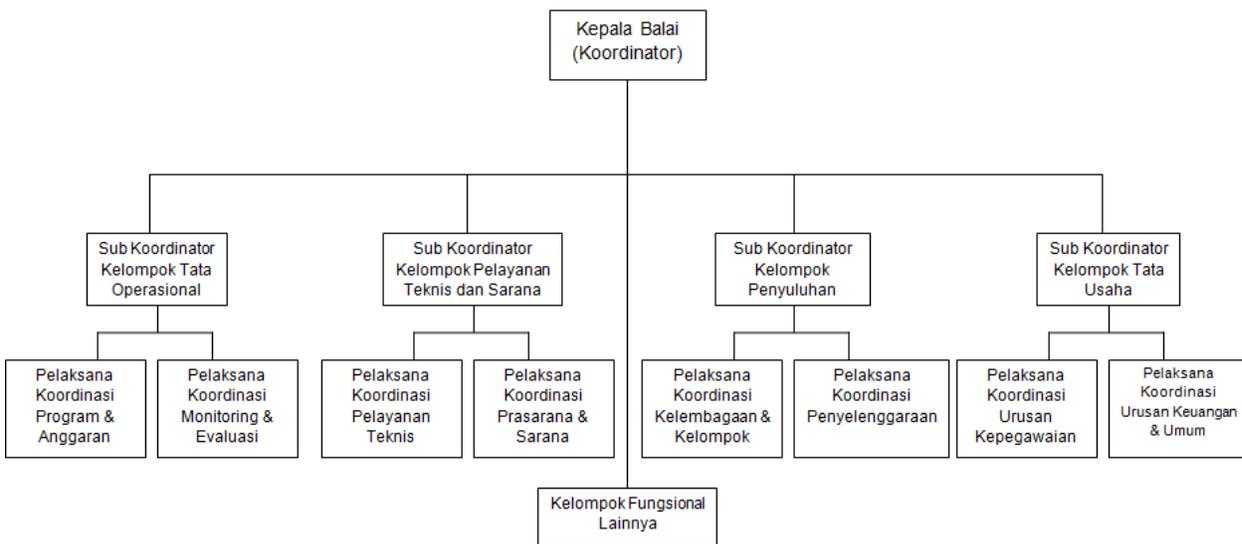
Selanjutnya terdapat Kelompok jabatan fungsional lainnya dilingkungan BRPPUPP yang mempunyai tugas melaksanakan:

- a. Penelitian Perikanan Perairan Umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
- b. Penyuluhan perikanan,
- c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.

Adapun struktur organisasi BRPPUPP telah disesuaikan dengan penambahan tugas dan fungsi Balai dalam mengampu kegiatan penyuluhan perikanan perairan daratan. Struktur organisasi BRPPUPP disajikan dalam gambar dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN**



Gambar 6. Struktur Organisasi BRPPUP.

## **BAB IV.**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. Target Kinerja**

##### **1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang dilaksanakan melalui program Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai mana tersaji berikut.

### TARGET KINERJA TAHUNAN 2020-2024 BRPPUPP (Riset)

Sasaran Strategis Dan IK		2020	2021	2022	2023	2024	Cascading
<b>STAKEHOLDERS</b>							
<b>SS 1.</b>	<b>Hasil Riset BRPPUPP yang dimanfaatkan</b>						
IKU 1	Data dan informasi hasil riset BRPPUPP yang digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan	1	2	1	1	1	Kakelti
<b>CUSTOMER</b>							
<b>SS 2.</b>	<b>Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPPUPP</b>						
IKU 2	Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan NRI di Perairan Darat (WPP NRI PD)	8	5	4	14	14	Kakelti
IKU 3	Karya Tulis Ilmiah BRPPUPP yang dipublikasikan	20	20	20	20	20	PT
<b>INTERNAL PROCESS</b>							
<b>SS 3.</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Riset BRPPUPP</b>						
IKU 4	Sarana dan Prasarana BRPPUPP yang ditingkatkan kapasitasnya	1	1	-	1	1	TU
<b>SS 4.</b>	<b>Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPPUPP</b>						

IKU 5	Sertifikasi Kelembagaan BRPPUPP	1	1	-	1	1	PT
<b>SS 5.</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada BRPPUPP</b>						
IKU 6	Jejaring dan/atau Kerjasama BRPPUPP yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti	2	2	1	2	2	PT
IKU 7	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP	73	73	74	80	80	TU
IKU 8	Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BRPPUPP (%)	84	84	86	84	84	PT
IKU 9	Nilai IKPA BRPPUPP	89	89	89	89	89	TU
IKU 10	Presentase Penyelesaian Temuan LHP BPK BRPPUPP	100	100	≤1	≤1	≤1	TU
IKU 11	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP	86	86	81	86	86	TO

IKU 12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP	80	80	92	80	80	TO
IKU 13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP	100	100	100	100	100	TO

### TARGET KINERJA TAHUNAN 2020-2024 BRPPUPP (Penyuluhan)

Sasaran Strategis Dan IK		2020	2021	2022	2023	2024	Cascading
<b>CUSTOMER</b>							
<b>SS 1.</b>	<b>Pendampingan Kelompok pelaku usaha/utama dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP</b>						
IKU 1	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRPUPP (Kelompok)	213	175	219	219	219	Penyuluhan
IKU 2	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	203	275	306	306	306	Penyuluhan
<b>SS 2.</b>	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar</b>						
IKU 3	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BRPPUPP Palembang (unit)	1	1	1	1	1	Penyuluhan

<b>INTERNAL PROCESS</b>							
<b>SS 3.</b>	<b>Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan</b>						
IKU 4	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BRPPUPP (kelompok)	4853	4853	5177	5177	5177	Penyuluhan
IKU 5	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan di BRPPUPP (unit)	1	1	1	1	1	Penyuluhan
<b>SS 4.</b>	<b>Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BRPUPP</b>						
IKU 6	Persentase layanan dukungan manajemen internal Penyuluhan KP - BRPPUPP (%)	100	100	100	100	100	Penyuluhan

## **B. Kerangka Pendanaan**

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan perairan umum, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN). Pendanaan APBN difokuskan untuk pelaksanaan riset serta pengembangan sarana dan prasarana perikanan perairan umum, penguatan pelayanan, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan lembaga.

Selain dari APBN, untuk peningkatan kelembagaan dan kompetensi sumberdaya manusia BRPPUPP juga mencari dan mengeksplorasi pendanaan diluar APBN, dari lembaga regional/SEAFDEC, FAO dan ACIAR.

## BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 2020-2024 merupakan dokumen yang disusun sebagaimana penjabaran amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra ini mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Renstra ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran- Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) setiap tahunnya di lingkup Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Namun demikian, mengingat dinamisnya perubahan serta adanya tuntutan pengembangan organisasi dan masyarakat, sangat mungkin ada hal-hal yang belum terakomodasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan perairan umum tidak hanya ditentukan oleh dokumen Renstra, tapi yang lebih penting adalah pelaksanaan dari dokumen renstra dimaksud dengan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta seluruh *stakeholders* perikanan perairan umum daratan merupakan hal yang mutlak dalam rangka mewujudkan harapan untuk menyukseskan pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 untuk kesejahteraan masyarakat nelayan Perairan Darat.

